

## MENJAGA KEBANGGAAN BANGSA: ANALISIS PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI KORUPSI 271 TRILIUN DAN MENINGKATKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Feni Nur Faidah<sup>1</sup>, Ari Metalin Ika Puspita<sup>2</sup>, Aulia Sherlin Lestari<sup>3</sup>,  
Nur Anisa Afriyanti<sup>4</sup>, Kirana Nayla Dewinta Hemi<sup>5</sup>

[feni.23011@mhs.unesa.ac.id](mailto:feni.23011@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [aripuspita@unesa.ac.id](mailto:aripuspita@unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [aulia.23013@mhs.unesa.ac.id](mailto:aulia.23013@mhs.unesa.ac.id)<sup>3</sup>,  
[nur.23015@mhs.unesa.ac.id](mailto:nur.23015@mhs.unesa.ac.id)<sup>4</sup>, [kirana.23004@mhs.unesa.ac.id](mailto:kirana.23004@mhs.unesa.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Surabaya

### ABSTRAK

Dalam menghadapi tantangan korupsi yang meresahkan, seperti kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kewarganegaraan di Indonesia, peran pendidikan Pancasila menjadi semakin penting. Artikel ini membahas secara rinci bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga kebanggaan bangsa, menghadapi korupsi, dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Melalui pendekatan analisis, artikel ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat moral dan etika bangsa. Referensi dari berbagai penelitian dan pemikiran mendukung argumen bahwa pendidikan Pancasila adalah kunci untuk membentengi kebanggaan bangsa dari ancaman korupsi dan membangun fondasi moral yang kokoh bagi generasi bangsa yang akan datang. serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, korupsi, moral, etika, kebanggaan bangsa, dan kesadaran masyarakat.

### ABSTRACT

*In the face of troubling corruption challenges, such as the 271 trillion rupiah corruption case, as well as increasing awareness of the importance of citizenship in Indonesia, the role of Pancasila education is becoming increasingly important. This article discusses in detail how Pancasila education can be an effective instrument in maintaining national pride, confronting corruption, and increasing civic awareness. Through an analytical approach, the article highlights the need for a deep understanding of Pancasila values as well as their application in daily life to strengthen the nation's morals and ethics. References from various researches and thoughts support the argument that Pancasila education is the key to fortify the nation's pride from the threat of corruption and build a solid moral foundation for the nation's future generations as well as raise public awareness regarding corruption cases that exist in Indonesia.*

**Keywords:** Pancasila education, citizenship, corruption, morals, ethics, national pride, and public awareness.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh suatu bangsa tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga mencakup keberlanjutan moral dan etika. Salah satu masalah yang menjadi fokus utama adalah korupsi, yang telah merajalela di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap korupsi semakin meningkat seiring dengan munculnya korupsi besar-besaran, salah satunya adalah kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah yang mengguncang fondasi perekonomian negara.

Tantangan korupsi yang mencapai angka sebesar itu bukan hanya sekadar masalah

ekonomi, tetapi juga mencoreng harga diri bangsa. Kasus tersebut bukanlah satu-satunya kejadian, melainkan bagian dari jaringan korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Implikasinya tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila menjadi penting sebagai landasan moral untuk membentengi kebanggaan bangsa dari ancaman korupsi yang menggerogoti.

Selain itu, meningkatnya kesadaran kewarganegaraan juga merupakan aspek yang tak kalah penting. Dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks, kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara harus ditanamkan secara mendalam. Pendidikan Pancasila tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai moral, tetapi juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia

Dengan melihat kedua aspek tersebut, maka peran pendidikan Pancasila dalam menjaga kebanggaan bangsa, menghadapi korupsi senilai 271 triliun, dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di Indonesia menjadi relevan dan mendesak. Artikel ini akan membahas secara rinci bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membangun fondasi moral yang kokoh bagi generasi bangsa yang akan datang. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah dari peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi dengan tujuan untuk diolah sehingga mendapatkan suatu analisis secara ilmiah. (Suryana, 2010) metode penelitian adalah prosedur atau Langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melalui pendekatan analisis. Metode pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dapat berupa analisis kualitatif, analisis kuantitatif atau kombinasi keduanya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Mixed Methods Analysis of Data. Dalam penelitian, pendekatan metode campuran memadukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data metodologi campuran menganut prinsip filosofis, menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan menggabungkan kedua metode tersebut. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat memperoleh data yang lebih lengkap, valid, reliabel, dan obyektif. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian analisis pendekatan analitik lebih efektif diterapkan dalam penelitian ini karena lebih mahir dalam menganalisis permasalahan yang lebih kompleks. Sumber-sumber dalam penelitian berasal dari data yang sebenarnya berasal dari analisis artikel yang diterbitkan dan jurnal terakreditasi. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka dilakukan penulis melalui proses membaca, menganalisis, dan mensintesis data yang diperoleh sebagai bahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah Korupsi Di Indonesia**

Ancaman global yang hampir mempengaruhi setiap negara di dunia adalah korupsi. Negatifnya, hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi yang kuat untuk memberantas korupsi. Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan serius yang selalu berdampak pada berbagai sektor masyarakat. Oleh karena itu, salah satu penyebab utama korupsi di tata niaga timah adalah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022, atau biasa disebut dengan praktik korupsi timah. Kasus ini melibatkan 16 orang yang menjadi tersangka korupsi melalui

Korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana (Jampidsus) dengan metode case building. Untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel imbas dari dugaan korupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Kejaung menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo untuk melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Besaran kerusakan lingkungan dalam kasus ini melebihi Rp 271 triliun, dengan kerusakan lingkungan terjadi baik di lahan basah maupun non lahan basah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan (ekologis) sekitar Rp 157 T, kerugian ekonomi lingkungan sekitar Rp 60 T, dan biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp 5 T. Selain itu, ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp 47 T.

### **Pendidikan Pancasila dalam menghadapi korupsi di Indonesia Arti Penting Pancasila**

Pancasila didirikan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sansekerta: panca yang berarti "lima" dan sila yang berarti "prinsip" atau "asas". Pancasila, termasuk beberapa ideologi utama, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh penduduk Indonesia. Salah satu aspek terpenting dari pancasila sebagai lambang negara adalah dianggap sebagai simbol perlawanan dalam menghadapi perubahan masyarakat, pergolakan, dan eksploitasi. Sebagai lambang negara, pancasila merupakan lambang dari seluruh lambang negara yang ada dalam UUD 1945.

### **Pentingnya Kewarganegaraan dan Anti Korupsi**

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi diasumsikan sangat penting bagi setiap peserta untuk mempelajari dan menghayatinya. Pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari karena banyak manfaatnya, seperti menjaga keutuhan NKRI, menumbuhkan karakter agar bisa menghargai hak orang lain, dan menahan diri dari segala tindakan yang dianggap melanggar peraturan.

Tujuan holistik pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas dan hukum Pancasila, serta peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Komitmen terhadap Negara. Kesatuan Republik Indonesia. Karena kedekatan keduanya, pentingnya pendidikan antikorupsi dan pendidikan kewarganegaraan tidak berbeda sama sekali. Akan menerapkan nilai antikorupsi dan mengembangkan antikorupsi pada seseorang dengan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dan kewarganegaraan mempengaruhi kondisi politik dan budaya bangsa Indonesia dalam hal ini. Mengingat korupsi yang ada, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi harus menjadi pedoman bagi warga negara dalam menghindari korupsi, memperkuat atribut antikorupsi, dan menggalakkan pendidikan antikorupsi.

### **Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Kasus Korupsi**

Untuk menangkal korupsi akibat pemberlakuan Pancasila, salah satu caranya adalah dengan meneladani kehidupan berkeluarga dengan memberlakukan kewajiban memulai pendidikan agama agar anak dapat mengembangkan budi pekerti dan moralitas yang kuat dalam menilai benar dan salah.

Pada langkah 1, sekelompok orang akan mengukur sesuatu sebelum menentukan

akurat atau tidaknya. Interaksi antara komunitas agamawan dengan masyarakat umum membentuk simbiosis mutualisme dalam pemberantasan korupsi.

Pada sila ke-2, tindakan korupsi adalah memiliki rasa keadilan dan etiket di seorang korupsi, karena para koruptor tidak memikirkan tindakan yang ia lakukan. Menurut tindakan ini, berarti masyarakat telah diberikan kewenangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Menurut sila ke - 3, para koruptor tidak mempunyai modal pribadi atau modal sosial karena mereka hanya mencatat nilai-nilai individu dan kekayaannya sendiri, serta tidak mencegah gejala eksternal yang dapat merusak perekonomian, menurunkan kekayaan nasional, dan merugikan kepentingan negara. Bangsa dan Bangsa.

Pada sila ke - 4, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara individu mewakili masing-masing negara sesuai dengan keadaannya dengan menangkap dan melarang para pelaku korupsi tersebut di atas.

Pada sila ke - 5, kegelisahan masyarakat bertambah karena proyek pembangunannya tertunda karena dana yang digunakan disemangati oleh oknum pejabat yang korup. Kelemahan dalam membangun dan ketekunan untuk mencapai kemajuan sosial disebabkan oleh banyaknya proyek bangunan yang tidak berjalan sesuai rencana.

Ketika Pancasila tertanam dalam kehidupan sehari-hari, maka ia dapat bekerjasama dengan beberapa bidang kehidupan sehari-hari masyarakat umum dan juga berkomunikasi dengan kelompok atau individu yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka memperjuangkan, melindungi, dan melaksanakan Pancasila. Dalam rangka penerapan hukum Pancasila, dapat dimanfaatkan beberapa hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai Pancasila dalam rangka pemberantasan korupsi:

1. Melaksanakan pendidikan karakter
2. Menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sehat
3. Keterbukaan dan akuntabilitas
4. Partisipasi masyarakat
5. Reformasi birokrasi

Pentingnya penerapan Pancasila dalam pemberantasan korupsi adalah untuk menjamin setiap warga negara dan anggota pemerintahan berperilaku sesuai dengan undang-undang dasar yang berfungsi sebagai pengaman korupsi, sehingga tercipta Indonesia yang lebih jujur dan bebas korupsi.

### **Meningkatkan Kesadaran Warga Negara Terhadap Kasus Korupsi Yang Ada Di Indonesia**

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran warga negara terhadap kasus korupsi di Indonesia, ada beberapa langkah – langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap kasus korupsi :

1. Pendidikan melawan korupsi adalah satu-satunya solusi yang ada. Pendidikan antikorupsi tertentu diajukan untuk membentuk kompetensi mental antikorupsi dan karakteristik dalam diri sendiri untuk ditularkan kepada lingkungannya. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk meningkatkan dan memperkuat standar antikorupsi.
2. Menerapkan langkah-langkah antikorupsi yang bermanfaat bagi berbagai lapisan masyarakat. Kampanye ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pejabat korup di Indonesia. Hal ini perlu dikendalikan oleh hukum dan politik pemerintah.
3. Untuk memastikan penerapan hukum yang efektif, memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pelaku korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

4. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik dan lembaga pemerintah yang mendukung masyarakat dalam memperkuat upaya antikorupsi.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dan pemberantasan korupsi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan mendapatkan dukungan dalam implementasinya.

Melalui pedoman tersebut, diharapkan kesadaran warga negara terhadap korupsi akan meningkat dan Indonesia menjadi negara yang lebih bebas korupsi.

## **KESIMPULAN**

Bagi masyarakat Indonesia, korupsi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Praktik korupsi telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga banyak menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil. Dalam kasus ini, terdapat enam belas orang tersangka yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi melalui Korupsi Agung Muda Tindak Pidana dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 271 triliun.

Kajian mengenai kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi sangat penting karena mempunyai banyak manfaat, seperti membantu reformasi NKRI, mengembangkan karakter untuk membantu sesama, dan melindungi diri dari tindakan yang melanggar hukum. Mengingat korupsi yang ada, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi harus menjadi pedoman bagi warga negara dalam menghindari korupsi, memperkuat atribut antikorupsi, dan menggalakkan pendidikan antikorupsi. Dengan mengadakan gerakan antikorupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, gerakan ini dapat dilaksanakan agar berkurangnya para koruptor yang ada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret. (2022). "Implementasi Pancasila terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia". *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 9 Edisi III
- Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari. (2022). "Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: Penting dan relevansi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol.8, No.1. 123-134.
- Rahmawati, Dewi. (2019). "Korupsi dan Kebangkitan Moral Bangsa." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 167-180.
- Satria, Heru Prasteya. (2020). "Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 45-58.
- Suryana, P. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN*
- Wahyuni, R. (2022). "Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan melalui Pendidikan Pancasila di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 23-36.